

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, karena sektor ini menyerap sumber daya manusia yang paling besar dan merupakan sumber pendapatan mayoritas penduduk Indonesia. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan dititikberatkan pada sektor pertanian (Soekartawi, 2005).

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian. Proses pencapaian pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan cara memperluas lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan serta mendukung pembangunan daerah dengan cara tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya yang ada (Departemen Pertanian, 2005).

Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Menurut Hakim (2008), beberapa masalah yang dimaksud yaitu: Pertama, sebahagian besar petani Indonesia sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Kedua, petani mengalami keterbatasan akses informasi pertanian. Ketiga, petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Keempat, masalah paling besar petani Indonesia adalah keterbatasan modal yang dimiliki.

Menanggulangi permasalahan tersebut, Presiden RI telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian pada tanggal 11 Juni 2005 dengan program-program antara lain: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani serta Pengembangan Sumberdaya dan Pemanfaatan Pemanfaatannya, baik dibidang perikanan maupun kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan (Apriantono, 2008).

Untuk mendukung pembangunan tersebut maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui: 1) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; 2) fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah; 3) fasilitasi untuk

terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; 4) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian (Departemen Pertanian, 2007).

Program jangka menengah (2005-2009) yang dicanangkan Departemen RI salah satunya adalah memfokuskan pada pembangunan pertanian perdesaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan dilakukan melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), yang merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.

Upaya dan strategi dalam pelaksanaan yang terpadu untuk mempercepat keberhasilan PUAP dapat dilakukan melalui; Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; Penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani; Penguatan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah. Tahun 2008 dan 2009, PUAP telah dilaksanakan di 20.426 desa atau gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di perdesaan dan diharapkan melalui gapoktan PUAP dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat petani sesuai dengan kebijakan PNPM-Mandiri (Departemen Pertanian, 2008).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi penerima dana bantuan PUAP diantara 33 Provinsi penerima dana bantuan PUAP (Lampiran 1). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan LKM-A pada gapoktan yang diharapkan menjadi lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani, dan khususnya masyarakat miskin di Nagari. Sasaran akhir dari PUAP adalah LKM-A yang berada dibawah naungan gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nagari dalam arti luas (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam pelaksanaan penerima program PUAP di Provinsi Sumatera Barat. Dimana terdapat 12 kecamatan dan 30 Nagari atau Desa (Lampiran 2) yang terdiri dari 42 gapoktan penerima PUAP di Kabupaten Lima Puluh Kota. Gapoktan Mudik Nama adalah salah satu dari 42 gapoktan tersebut. Gapoktan Mudik Nama ini berada di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan sentra pengembangan komoditi jeruk di Sumatera Barat. Kecamatan Gunung Omeh adalah salah satu dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan Gunung Omeh sangat dikenal dengan tanaman jeruknya dengan luas 747,25 ha dengan produksi 3.025 ton/tahun (Lampiran 4). Komoditi jeruk yang diusahakan petani adalah jeruk siam (*Citrus nobilis* LOUR var. *microcarpa*). Sedangkan dikalangan petani jeruk sering disebut dengan nama Jeruk Siam Gunung Omeh (Jesigo) (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009).

Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berfungsi sebagai sumber gizi, sumber pendapatan dan sumber devisa Negara. Besarnya kontribusi agroindustri jeruk dalam meningkatkan pendapatan dan sebagai pengembangan sentra jeruk baru (Karsinah *et al.* 2002). Jeruk adalah salah satu komoditas buah-buahan yang menjadikan andalan sektor pertanian Indonesia. Komoditas jeruk tumbuh dan berkembang di beberapa daerah dan masing-masingnya mempunyai spesifikasi sendiri (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, 2008). Selain itu, buah jeruk termasuk kelompok buah yang memiliki nilai ekonomis yang penting, disamping bergizi tinggi terutama Vitamin C, usahatani jeruk juga dapat meningkatkan pendapatan petani (AAK, 1994).

Setelah program PUAP diimplementasikan di Gapoktan Mudik Nama, tentu program ini tidak akan berhenti sampai disitu saja. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah ada dampak dana yang diberikan program PUAP kepada petani terhadap pengembangan usaha agribisnis jeruk dengan adanya peningkatan pendapatan petani.

1.2. Perumusan Masalah

Sumber modal bagi pembiayaan dan modal pertanian dapat diperoleh dari lembaga non bank. Namun, sebagian besar petani belum bisa mengakses sumber modal tersebut karena adanya keterbatasan dan ketidakmampuan petani untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak lembaga terkait.

Keterbatasan dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dengan pengadaan sarana produksi meliputi bibit, pupuk maupun obat-obatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, tekanan sosial lebih tertuju kepada penilaian sebagian besar masyarakat diluar petani yang menilai bahwa petani itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan modal petani melalui program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dituangkan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan modal yang dihadapi petani. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. PUAP bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, yaitu: pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT), serta meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka mengakses kepermodalan (Departemen Pertanian, 2008).

Sesuai dengan sasaran PUAP antara lain yaitu berkembangnya usaha agribisnis, berkembangnya gapoktan atau poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani, berkembangnya usaha pelaku agribisnis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, kinerja pengembangan kelembagaan gapoktan dan usaha agribisnis penerima PUAP termasuk penyerapan tenaga kerja perdesaan (Departemen Pertanian, 2008).

Tahun anggaran 2008 untuk Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan kuota sebanyak 208 gapoktan oleh Departemen Pertanian sebagai penerima dana program BLM-PUAP (Lampiran 1). Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 12 diantaranya merupakan daerah yang masuk ke dalam rencana sebaran penerima dana program BLM-PUAP tahun anggaran 2008 yang terdiri dari 30 desa dan nagari (Lampiran 2). Namun, dari 208 kuota gapoktan yang telah direncanakan untuk tahun 2008 tersebut, hanya 204 gapoktan yang menerima dana program PUAP (Lampiran 3), sedangkan sisanya terkendala masalah lemahnya administrasi dan juga keadaan geografis daerah sasaran yang tidak mendukung. Adapun gapoktan yang tidak

mendapatkan kuota PUAP tahun 2008 terdiri dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Sawah Lunto, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Beberapa gapoktan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengajukan permohonan untuk dapat menerima dana program PUAP untuk Tahun 2008. Salah satu gapoktan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menerima dana program PUAP adalah Gapoktan Mudik Nama (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Gapoktan Mudik Nama terdiri dari tujuh kelompok tani yaitu: Kelompok Tani Saiyo Sakato, Kelompok Tani Pinang Balirik, Kelompok Tani Maju Basamo, Kelompok Tani KWT Seroja, Kelompok Tani Harapan Maju, Kelompok Tani Karya Maju Bersama, Kelompok Tani KWT Ibunda (Lampiran 5). Anggota gapoktan terdiri dari 163 orang dan semua anggota merupakan petani jeruk.

Usahatani jeruk di daerah Kecamatan Gunung Omeh merupakan usahatani jeruk rakyat yang pada umumnya diusahakan dilahan yang sempit. Penggunaan tanaman yang beragam dalam satu areal mengakibatkan timbulnya inefisien pada usahatani jeruk sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan petani. Disamping itu, pemberian pupuk dan pengendalian hama masih sering terbengkalai disebabkan kurangnya modal yang dimiliki petani sehingga mengakibatkan produksi jeruk yang dihasilkan rendah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi petani dalam usahatani jeruk di Gapoktan Mudik Nama adalah lemahnya modal usaha yang dimiliki petani serta rendahnya pengetahuan petani tentang bagaimana memperoleh modal usaha. Dalam usahatani jeruk membutuhkan biaya yang cukup besar karena budidaya jeruk pada umumnya membutuhkan biaya pemeliharaan yang intensif. Keterbatasan dan kesulitan petani dalam memperoleh modal usahatani, mengakibatkan usahatani jeruk mereka terbengkalai. Rendahnya pengetahuan petani membuat mereka kurang paham bagaimana cara memperoleh kredit atau pinjaman sehingga menyebabkan lemahnya akses petani terhadap lembaga keuangan yang ada. Persoalan ini sering terjadi dikalangan petani dalam menanggapi program pemerintah lainnya, anggota sering menganggap bahwa dana program pemerintah adalah pinjaman cuma-cuma yang tidak harus dikembalikan kepada lembaga keuangan yang mengelola.

Gambaran diatas menunjukkan, sebenarnya yang lebih diperlukan untuk mendapatkan modal usaha bukan hanya adanya lembaga ataupun program yang membantu masalah

penyediaan modal bagi petani, melainkan bagaimana program tersebut menyelesaikan kendala permodalan yang terjadi sehingga dapat membantu petani dalam mengelola usahanya. Dengan pernyataan ini maka muncullah pertanyaan bagi peneliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana PUAP yang dijalankan pada usahatani jeruk di Gapoktan Mudik Nama.
2. Bagaimana dampak pemberian dana PUAP terhadap pendapatan dan keuntungan petani jeruk di Gapoktan Mudik Nama.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti mengangkat judul “**Dampak Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Usahatani Jeruk di Gapoktan Mudik Nama Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota**”.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran dana program PUAP pada usahatani jeruk di Gapoktan Mudik Nama berdasarkan pedoman umum program PUAP.
2. Menganalisa dampak dana PUAP terhadap pendapatan dan keuntungan petani jeruk di Gapoktan Mudik Nama.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal:

1. Sebagai sumber informasi bagi petani untuk melihat seberapa besar pengaruh dana PUAP terhadap tingkat pendapatan petani dari usahatani jeruk sebelum dan setelah memanfaatkan dana PUAP.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak pengelola Gapoktan Mudik Nama dalam mengelola dan menyediakan modal usaha bagi anggota.
3. Sebagai sumber informasi bagi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan usahatani jeruk

